

**Peran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Aceh Dalam Pembangunan Rumah Dhuafa di Kota Banda
Aceh**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**ASRA BI ABDIHI
NIM. 190802128**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/ 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Asra Bi Abdihi
NIM : 190802128
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Aceh Tengah, 29 September 2001
Alamat : JL. JAKALAM NO. 14

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat di pertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Mei 2026



Peneliti

ASRA BI ABDIHI

NIM.190802128

**PERAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN ACEH DALAM PEMBANGUNAN RUMAH DHUAFU DI
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

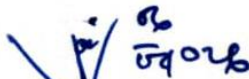
ASRA BI ABDIHI

NIM : 190802128

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk Di Munaqasyah Kan oleh :

Pembimbing I



Dr. S. Amirul Kamar, MM., M.Si.

NIP. 196110051982031007

**PERAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN ACEH DALAM PEMBANGUNAN RUMAH
DHUFA DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Asra Bi Abdihi

NIM. 190802128

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 12 Mei 2026

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Said Amirul Kamar, MM., M.Si

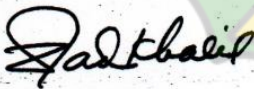
NIP. 196110051982031007

Sekretaris,



Evi Yusnaini, S.A.P

Penguji I,



Zakki Fuad Khalil I, S.IP., M.Si

NIP. 199011192022031001

Penguji II,

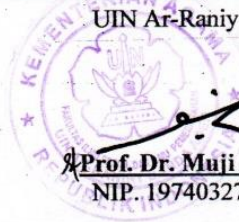


Habibul Abrar .B. Sc., M.Si.

NIP. 199407072025051005

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran serta kendala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh. Masalah utama dalam penelitian ini adalah terbatasnya peran dinas serta adanya faktor penghambat yang belum teratasi sepenuhnya dalam pelaksanaan program tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi Perumahan Rakyat. Analisis data dilakukan dengan pendekatan teori peran yang mencakup dimensi hak dan kewajiban serta fungsi organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh telah menjalankan perannya sebagai pelaksana teknis kebijakan pemerintah Aceh melalui program Rumah Layak Huni (RLH). Peran tersebut meliputi perencanaan program, pendataan dan verifikasi penerima manfaat yang bekerja sama dengan pemerintah gampong, pelaksanaan pembangunan fisik, hingga pengawasan untuk memastikan standar kelayakan hunian terpenuhi. Meskipun telah berjalan secara dinamis, penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala utama, yaitu keterbatasan anggaran yang membatasi cakupan bantuan, permasalahan administrasi kepemilikan tanah bagi calon penerima, serta kompleksitas proses pendataan yang memerlukan ketelitian tinggi agar bantuan tepat sasaran. Kesimpulannya, peran dinas sudah cukup baik sesuai tugas dan fungsinya, namun diperlukan peningkatan koordinasi lintas sektoral dan pengelolaan anggaran yang lebih optimal untuk menjangkau lebih banyak masyarakat dhuafa di masa depan.

Kata Kunci: *Peran Dinas, Pembangunan, Rumah Dhuafa, Kota Banda Aceh.*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Kita Panjatkan Kehadirat Allah SWT Yang Telah Melimpahkan Rahmat Serta Karunia-Nya Sehingga Peneliti Mampu Menyelesaikan Penyusunan Skripsi Yang Berjudul Peran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh Dalam Pembangunan Rumah Dhuafa Di Kota Banda Aceh Dalam Penulisan Skripsi Ini, Saya Menyadari Bahwa Ada Banyak Kekurangan. Namun Berkat Bantuan Dari Berbagai Pihak Alhamdulillah Saya Mampu Menyelesaikan Tugas Akhir Ini. Untuk Itu, Saya Menyampaikan Terima Kasih Dan Penghargaan Yang Tinggi Kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag., Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M. Ag., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Eka Januar, M.Soc.Sc Selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Dr. Said Amirul Kamar, MM., M.Si.selaku dosen pembimbing I. yang telah memberikan masukan dan serta saran selama proses bimbingan berlangsung.
6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara Yang Senantiasa Memberikan Ilmu Pengetahuan Dan Bimbingan Selama Perkuliahan.
7. Kedua Orang Tua Peneliti, Bapak Bukhari, Dan Ibu Nikmah Ayah Dan Ibu Yang Selalu Menjadi *Support System* Utama, Yang Telah Memberikan Dukungan Moral Dan Materil Sehingga Peneliti Dapat Menyelesaikan Skripsi Ini Dengan Baik.
8. Teman-Teman Mahasiswa Seangkatan Tahun 2019 Yang Saling Bekerja Sama Dan Saling Membantu, Memberi Masukan Untuk Peneliti.

Akhir Kata Saya Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebanyak Banyaknya Kepada Semua Pihak Yang Telah Membantu. Saya Menyadari Bahwa Penulisan Ini Masih Ada Kekurangan, Oleh

Karena Itu Saya Mengharap Kritikan Dan Saran Yang Membangun Semua Pihak Untuk Kesempurnaan Skripsi Ini. Semoga Skripsi Ini Dapat Bermanfaat Bagi Pembaca Dan Pihak-Pihak Yang Membacanya.

Banda Aceh, 12 Mei 2026
Peneliti



ASRA BI ABDIHI
NIM. 190802128



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TEBEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSKATA	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Teori Peran	6
2.1.2 Teori Pelayanan Publik	7
2.1.3 Teori Koordinasi	8
2.1.4 Konsep Rumah Dhuafa	9
2.1.5 Teori Pembangunan	10
2.1.6 Kerangka Berpikir	13
2.2 Pembahasan Penelitian Yang Relevan	14
BAB III METODE PENELITIAN	17
3.1 Pendekatan Penelitian	17
3.2 Fokus Penelitian	17
3.3 Lokasi Penelitian	18
3.4 Jenis dan Sumber Data	18
3.5 Informan Penelitian	20
3.6 Teknik Pengumpulan Data	20
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	23
4.2 Hasil dan Pembahasan	24

4.2.1 Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam Pembangunan Rumah Dhuafa di Kota Banda Aceh	24
4.2.2 Kendala Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam Pembangunan Rumah Dhuafa di Kota Banda Aceh	27
4.3 Pembahasan	29
4.3.1 Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam Pembangunan Rumah Dhuafa di Kota Banda Aceh	29
4.3.2 Kendala Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam Pembangunan Rumah Dhuafa di Kota Banda Aceh	32
BAB V PENUTUP	34
5.1 Kesimpulan	34
5.2 Saran	34
DAFTAR PUSTAKA	36
LAMPIRAN	38
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	43



DAFTAR TEBEL

Tabel 3.1 Dimensi dan Indikator Peran.....	18
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	20



DAFTAR LAMPIRAN

lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fisip	39
lampiran 2 Surat Izin Penelitian	40
lampiran 3 Surat Balasan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
lampiran 4 Pedoman Wawancara	41
lampiran 5 Dokumentasi Penelitian	42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki peranan penting dalam menunjang kualitas hidup masyarakat. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kehidupan yang aman, sehat, nyaman, dan layak. Keberadaan rumah yang layak huni menjadi bagian penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat karena berkaitan dengan kondisi sosial, kesehatan, keamanan, serta keberlangsungan kehidupan keluarga. Oleh sebab itu, penyediaan perumahan yang layak menjadi tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat dhuafa yang memiliki keterbatasan ekonomi.¹

Dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh disebutkan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.² Melalui kewenangan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat, termasuk masyarakat dhuafa di Kota Banda Aceh. Peran tersebut tidak hanya mencakup pembangunan fisik rumah, tetapi juga meliputi perencanaan program, pendataan penerima bantuan, pengawasan pelaksanaan pembangunan, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.³

Selain sandang dan pangan, kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia. Dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknik Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Status

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

² Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 212.

Pengalihan, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara dijelaskan bahwa pembangunan perumahan dan permukiman harus memperhatikan aspek aksesibilitas, infrastruktur, serta kelayakan lingkungan hunian.⁴ Dengan demikian, pembangunan perumahan tidak hanya berorientasi pada tersedianya bangunan rumah semata, tetapi juga pada terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan mendukung aktivitas sosial masyarakat.

Pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Pertumbuhan penduduk serta perkembangan kawasan perkotaan menyebabkan kebutuhan terhadap hunian layak semakin meningkat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.⁵ Dalam konteks tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan program-program pembangunan yang mampu membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang layak huni. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah melalui program pembangunan rumah dhuafa yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.

Program pembangunan rumah dhuafa merupakan bentuk pelayanan sosial pemerintah kepada masyarakat kurang mampu yang belum memiliki rumah layak huni.⁶ Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan. Selain memberikan manfaat secara fisik, program rumah dhuafa juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat penerima bantuan, menciptakan rasa aman dan nyaman dalam lingkungan keluarga, serta mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang lebih baik.

Namun, dalam pelaksanaan program pembangunan rumah dhuafa masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Beberapa kendala tersebut antara

⁴ Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknik Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Status Pengalihan, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.

⁵ Sadana Agus, *Perencanaan Kawasan Permukiman* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 25.

⁶ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 128.

lain keterbatasan anggaran, proses pendataan calon penerima bantuan yang membutuhkan ketelitian, serta permasalahan administrasi kepemilikan tanah masyarakat.⁷ Selain itu, pelaksanaan pembangunan juga memerlukan koordinasi yang baik antara dinas, pemerintah gampong, serta masyarakat agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

Berdasarkan kondisi tersebut, peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh menjadi sangat penting dalam memastikan program pembangunan rumah dhuafa dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam Pembangunan Rumah Dhuafa di Kota Banda Aceh.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian mengenai Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam Pembangunan Rumah Dhuafa di Kota Banda Aceh, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih terdapat masyarakat dhuafa di Kota Banda Aceh yang belum memiliki rumah layak huni.
2. Pelaksanaan pembangunan rumah dhuafa masih menghadapi keterbatasan anggaran sehingga belum mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan.
3. Proses pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan rumah dhuafa masih memerlukan ketelitian agar bantuan dapat tepat sasaran.
4. Masih terdapat kendala administrasi kepemilikan tanah yang menghambat pelaksanaan pembangunan rumah dhuafa.
5. Koordinasi antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dengan pemerintah gampong dan pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif.

⁷ Nurwati, "Permasalahan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 145.

6. Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam pelaksanaan pembangunan rumah dhuafa perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh Dalam Pembangunan Rumah Dhuafa Di Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala Peran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh Dalam Pembangunan Rumah Dhuafa Di Kota Banda Aceh

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian mengenai Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam Pembangunan Rumah Dhuafa di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan teori peran, pelayanan publik, dan koordinasi dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembangunan rumah layak

huni, pelayanan sosial pemerintah, serta kebijakan perumahan bagi masyarakat kurang mampu.⁸

Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya kajian ilmiah mengenai peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan sosial, khususnya dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat dhuafa di daerah.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh, terutama dalam aspek perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan program.

b. Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan perumahan dan pelayanan sosial bagi masyarakat kurang mampu sehingga program bantuan rumah layak huni dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya program pembangunan rumah dhuafa sebagai bentuk pelayanan sosial pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan menyediakan hunian yang layak.⁹

d. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian terkait peran pemerintah, pelayanan publik, pembangunan perumahan, maupun program bantuan sosial di bidang perumahan.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 298.

⁹ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 135.

BAB II

TINJAUAN PUSKATA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Peran

Teori peran (role theory) merupakan teori yang digunakan untuk menjelaskan perilaku individu maupun organisasi berdasarkan kedudukan, fungsi, dan tanggung jawab yang dimilikinya dalam suatu sistem sosial maupun kelembagaan. Dalam administrasi publik, teori peran sangat relevan karena dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana lembaga pemerintah menjalankan tugas dan kewenangannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan program pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), Seseorang atau lembaga dikatakan menjalankan peran apabila telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimiliki.¹⁰ Konsep ini menunjukkan bahwa setiap posisi dalam organisasi memiliki seperangkat tugas, tanggung jawab, dan harapan tertentu yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam perspektif administrasi publik, peran lembaga pemerintah berkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Instansi pemerintah dibentuk untuk menjalankan kebijakan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang kewenangannya. Oleh karena itu, keberhasilan suatu instansi pemerintah dapat dilihat dari sejauh mana lembaga tersebut mampu menjalankan perannya secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Teori peran juga menjelaskan bahwa pelaksanaan peran dipengaruhi oleh harapan masyarakat dan tuntutan organisasi. Dalam birokrasi pemerintahan, masyarakat mengharapkan pemerintah mampu memberikan pelayanan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, peran pemerintah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat sosial karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 212.

Secara konseptual, peran dapat dibedakan menjadi peran formal dan peran aktual. Peran formal merupakan peran yang melekat pada jabatan atau kedudukan berdasarkan aturan organisasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan peran aktual merupakan pelaksanaan nyata dari tugas dan tanggung jawab dalam praktik di lapangan. Dalam administrasi publik, sering ditemukan adanya perbedaan antara peran formal dan peran aktual akibat keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, maupun faktor teknis lainnya.

Dalam konteks penelitian ini, teori peran digunakan untuk menganalisis bagaimana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh menjalankan tugas dan kewenangannya dalam pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh. Peran tersebut dapat dilihat melalui proses perencanaan program, pelaksanaan pembangunan rumah, koordinasi dengan pemerintah gampong, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan rumah layak huni.

Dengan demikian, teori peran menjadi landasan utama dalam penelitian ini karena dapat menjelaskan hubungan antara kedudukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dengan pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya dalam pembangunan rumah dhuafa bagi masyarakat kurang mampu.

2.1.2 Teori Pelayanan Publik

Teori pelayanan publik merupakan teori yang menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan publik. Dalam administrasi publik, pelayanan publik menjadi salah satu fungsi utama pemerintah karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

pelayanan publik adalah setiap kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹¹ Pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan pelayanan administratif, tetapi juga mencakup pelayanan sosial dan pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

¹¹ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 128.

Pelayanan publik yang baik harus dilaksanakan secara efektif, transparan, responsif, dan tepat sasaran. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut mampu memberikan pelayanan yang berkualitas agar masyarakat memperoleh hak-haknya secara adil. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik menjadi salah satu indikator keberhasilan organisasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Dalam konteks pembangunan rumah dhuafa, pelayanan publik diwujudkan melalui penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Program pembangunan rumah dhuafa merupakan bentuk pelayanan sosial pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang aman dan layak. Melalui program tersebut, pemerintah tidak hanya membangun fisik rumah, tetapi juga berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Pelayanan tersebut meliputi pendataan masyarakat penerima bantuan, perencanaan pembangunan rumah, pelaksanaan pembangunan, hingga pengawasan terhadap hasil pembangunan.

Dalam penelitian ini, teori pelayanan publik digunakan untuk melihat bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam pelaksanaan program pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh. Analisis pelayanan publik dapat dilihat dari ketepatan sasaran bantuan, proses pelaksanaan program, transparansi pelayanan, dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan.

2.1.3 Teori Koordinasi

Teori koordinasi merupakan teori yang menjelaskan pentingnya kerja sama dan penyelarasan tugas antar bagian organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Dalam administrasi publik, koordinasi menjadi unsur penting karena pelaksanaan program pemerintah umumnya melibatkan berbagai pihak dan unit kerja.

koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan dari unit-unit organisasi agar dapat bergerak secara

harmonis dan saling mendukung dalam mencapai tujuan organisasi.¹² Koordinasi diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih tugas, konflik kewenangan, serta ketidakefisienan dalam pelaksanaan program.

Dalam organisasi pemerintahan, koordinasi tidak hanya dilakukan secara internal antar bidang dalam satu instansi, tetapi juga secara eksternal dengan instansi lain, pemerintah daerah, aparatur gampong, dan masyarakat. Koordinasi yang baik akan membantu memperlancar pelaksanaan program dan meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam program pembangunan rumah dhuafa, koordinasi menjadi sangat penting karena pelaksanaan program melibatkan banyak pihak, seperti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, aparatur gampong, masyarakat penerima bantuan, serta pihak pelaksana pembangunan. Koordinasi diperlukan dalam proses pendataan penerima bantuan, penentuan lokasi pembangunan, pelaksanaan pembangunan rumah, hingga pengawasan terhadap hasil pembangunan.

Apabila koordinasi tidak berjalan dengan baik, maka program pembangunan dapat mengalami berbagai hambatan, seperti keterlambatan pelaksanaan, kesalahan data penerima bantuan, maupun rendahnya kualitas pembangunan rumah. Oleh sebab itu, koordinasi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program pembangunan rumah dhuafa.

Dalam penelitian ini, teori koordinasi digunakan untuk menganalisis bagaimana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh.

2.1.4 Konsep Rumah Dhuafa

Rumah dhuafa merupakan program bantuan pembangunan atau rehabilitasi rumah yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang belum memiliki tempat tinggal layak huni. Program ini bertujuan membantu masyarakat dhuafa memperoleh rumah yang aman, sehat, dan layak untuk ditinggali.

¹² Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 95.

Secara umum, masyarakat dhuafa merupakan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan tempat tinggal. Oleh karena itu, pemerintah melalui program rumah dhuafa berupaya memberikan bantuan perumahan sebagai bentuk pelayanan sosial dan perlindungan terhadap masyarakat miskin.

Program pembangunan rumah dhuafa tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat penerima bantuan. Dengan adanya rumah layak huni, masyarakat diharapkan dapat hidup lebih sehat, aman, dan nyaman.

Dalam pelaksanaan program rumah dhuafa, pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria penerima bantuan. Oleh sebab itu, proses pendataan, verifikasi, dan pengawasan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program.

Dalam penelitian ini, konsep rumah dhuafa digunakan untuk memahami pelaksanaan program bantuan rumah layak huni yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh di Kota Banda Aceh.

2.1.5 Teori Pembangunan

Menurut Rogers, pembangunan dipahami sebagai suatu proses perubahan sosial yang melibatkan partisipasi luas dari masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai kemajuan baik secara sosial maupun material. Kemajuan tersebut mencakup peningkatan nilai-nilai seperti kebenaran, keadilan, serta kualitas hidup lainnya yang dihargai oleh masyarakat. Proses ini diarahkan untuk memberikan manfaat bagi sebagian besar masyarakat melalui peningkatan kontrol yang mereka miliki terhadap lingkungan sekitarnya..¹³

memandang pembangunan sebagai suatu transformasi sosial yang mengarah pada terbentuknya pola masyarakat yang lebih mampu merealisasikan nilai-nilai kemanusiaan. Proses ini memungkinkan masyarakat memperoleh kontrol yang lebih luas terhadap lingkungan, arah politik, serta peningkatan kendali

¹³ Zulkarimen Nasution, *Komunikasi Pembangunan: Pengenala Teori Dan Penerapannya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 28.

individu terhadap dirinya sendiri. Di sisi lain, Shoemaker menjelaskan bahwa pembangunan merupakan proses perubahan sosial yang melibatkan pengenalan ide-ide baru dalam suatu sistem sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita serta kualitas hidup masyarakat melalui penggunaan metode produksi yang lebih modern dalam sistem tersebut.

pembangunan dipahami sebagai suatu proses yang mencakup peningkatan pengetahuan dan keterampilan, perluasan wawasan manusia, serta munculnya kesadaran baru. Selain itu, pembangunan juga ditandai dengan meningkatnya nilai-nilai kemanusiaan dan tumbuhnya rasa percaya diri dalam diri individu.

Berdasarkan berbagai definisi pembangunan yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang mengarah pada kondisi yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat.

Di Indonesia, istilah pembangunan telah menjadi konsep sentral yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Secara umum, pembangunan dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat beserta warganya.¹⁴ Namun, dalam praktiknya, kemajuan yang dimaksud sering kali lebih menitikberatkan pada aspek material. Akibatnya, pembangunan kerap diidentikkan dengan pencapaian di bidang ekonomi oleh suatu masyarakat. Bahkan, dalam beberapa kondisi, pembangunan juga dipandang sebagai suatu bentuk kehidupan yang kurang menguntungkan bagi kelompok tertentu yang termarginalkan, serta sebagai ideologi politik yang digunakan untuk melegitimasi kekuasaan pemerintah dalam membatasi kritik dari masyarakat (Budiman, 1995: 1–2).

Pembangunan pada hakikatnya mencakup dua elemen utama, yaitu aspek material yang berkaitan dengan produksi dan distribusi, serta aspek manusia sebagai pelaku utama yang berinisiatif dalam proses pembangunan. Pada akhirnya, tujuan pembangunan harus berorientasi pada pengembangan manusia itu sendiri, khususnya dalam membentuk individu yang kreatif. Kreativitas tersebut hanya dapat berkembang apabila manusia berada dalam kondisi yang mendukung, seperti merasa aman, bahagia, dan terbebas dari rasa

¹⁴ Kartono, D. T., & Nurcholis, H. (2016). Konsep dan Teori Pembangunan. *Jakarta: Pustaka Pelajar*.

takut. Oleh sebab itu, pembangunan tidak semata-mata berfokus pada aspek material, tetapi juga harus menciptakan kondisi yang memungkinkan manusia mengembangkan potensi kreatifnya (Budiman, 1995: 13–14).

Dalam praktik pembangunan di berbagai negara, khususnya pada tahap awal, fokus utama umumnya diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi. Meskipun terdapat beragam pendekatan dan perspektif, esensi utama pembangunan terletak pada pembentukan modal. Oleh karena itu, strategi yang sering dianggap paling efektif adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui masuknya investasi asing serta pengembangan sektor industri.



2.1.6 Kerangka Berpikir

Peran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh
Dalam Pembangunan Rumah Dhuafa Di Kota Banda Aceh

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh?

1. Peraturan Menteri Perumahan rakyat Republik Indonesia nomor 22 tahun 2008 Tentang Pedoman Teknik Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Status Pengalihan, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.38/PRT/M/2015 Tentang Bantuan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum

Teori Peran Teori Pembangunan Konsep Rumah Dhuafa

Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Peran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh Dalam Pembangunan Rumah Dhuafa Di Kota Banda Aceh

Untuk mengetahui Dan Menganalisis kendala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh Dalam Pembangunan Rumah Dhuafa Di Kota Banda Aceh

2.2 Pembahasan Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan merupakan kajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan, referensi, serta untuk melihat perbedaan dan kebaruan penelitian yang dilakukan peneliti. Selain itu, penelitian yang relevan juga membantu memperkuat landasan teoritis dan memperjelas fokus penelitian mengenai Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam Pembangunan Rumah Dhuafa di Kota Banda Aceh.

Penelitian pertama dilakukan oleh Nurwati yang berjudul *Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program bantuan rumah layak huni sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi, ketepatan pendataan penerima bantuan, serta pengawasan pelaksanaan pembangunan di lapangan. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran dan administrasi kepemilikan tanah menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program perumahan bagi masyarakat miskin.¹⁵ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama membahas program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada pelaksanaan program secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh.

Penelitian kedua dilakukan oleh Harbani Pasolong dalam kajiannya mengenai pelayanan publik di bidang sosial dan pembangunan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kualitas pelayanan publik sangat menentukan keberhasilan program pemerintah, terutama program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.¹⁶ Pelayanan yang efektif, transparan, dan tepat sasaran akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap program pemerintah. Relevansi penelitian tersebut dengan

¹⁵ Nurwati, "Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 145.

¹⁶ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 128.

penelitian ini terletak pada aspek pelayanan publik dalam program pembangunan rumah dhuafa. Perbedaannya, penelitian ini lebih fokus pada bagaimana peran dinas dalam pelaksanaan program pembangunan rumah dhuafa sebagai bentuk pelayanan sosial pemerintah.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Sondang P. Siagian mengenai koordinasi dalam organisasi pemerintahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa koordinasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi program pemerintah karena melibatkan berbagai pihak dan unit kerja.¹⁷ Tanpa koordinasi yang baik, pelaksanaan program dapat mengalami hambatan seperti keterlambatan pekerjaan, tumpang tindih tugas, dan rendahnya efektivitas pelayanan. Penelitian ini relevan karena pembangunan rumah dhuafa juga memerlukan koordinasi antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, aparatur gampong, masyarakat, dan pihak pelaksana pembangunan.

Penelitian lain mengenai program rumah layak huni menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan rumah masyarakat miskin tidak hanya ditentukan oleh tersedianya anggaran, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat.¹⁸ Program bantuan rumah akan berjalan efektif apabila pemerintah mampu memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta dilakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan beberapa penelitian yang relevan tersebut, dapat dipahami bahwa program pembangunan rumah layak huni memiliki kaitan erat dengan peran pemerintah, kualitas pelayanan publik, dan koordinasi antar pihak terkait. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai pembangunan rumah bagi masyarakat kurang mampu. Sementara itu, perbedaannya terletak pada objek penelitian dan fokus analisis. Penelitian ini secara khusus membahas mengenai peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam

¹⁷ Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 110.

¹⁸ Agus Sadana, *Perencanaan Kawasan Permukiman* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 67.

pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai pelaksanaan program bantuan rumah dhuafa di daerah tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan berbagai karakteristik data secara mendalam guna memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembaca terkait topik yang dikaji.¹⁹ Data kualitatif sendiri merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, kalimat, skema, maupun gambar. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat alami sesuai dengan kondisi yang ada tanpa adanya manipulasi, dengan penekanan pada makna yang terkandung di dalamnya. Melalui pendekatan kualitatif tersebut, peneliti berupaya mengkaji dan menjelaskan peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian berisi uraian rinci mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mencakup aspek atau topik yang akan ditelaah dalam penelitian. Fokus ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam proses pengamatan, sehingga kegiatan observasi serta analisis data dapat dilakukan secara lebih terarah dan sistematis.²⁰

Oleh karena itu, diperlukan penggunaan indikator sebagai batasan agar pembahasan tidak melebar dan tetap selaras dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Indikator tersebut digunakan untuk mengarahkan analisis dalam mengkaji Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh.

¹⁹ Wijaya, H. (2018). *Analisis data kualitatif ilmu pendidikan teologi*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

²⁰ ARIEF, M., Putra, R., & Ermanovida, E. (2018). *Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).

Tabel 3.1
Dimensi dan Indikator Peran

NO	Dimensi	Indikator	Regulasi
1	Peran	Penyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.	Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh.
2	Pembangunan	Teknik Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Status Pengalihan, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.	Peraturan Menteri Perumahan rakyat Republik Indonesia nomor 22 tahun 2008 Tentang Pedoman Teknik Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Status Pengalihan, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat peneliti saya adalah pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh Dalam Pembangunan Rumah Dhuafa Di Kota Banda Aceh²¹. Lokasi ini dipilih karena kegiatan pembangunan rumah dhuafa menjadi pekerjaan dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama berupa kata-kata dan tindakan, sedangkan data tambahan dapat diperoleh dari dokumen dan sumber lain yang relevan. Jenis data yang digunakan

²¹ Matondang, E. M. (2021). Peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gayo Lues dalam Penyelenggaraan Lingkungan Sehat Perumahan bagi Masyarakat Kecamatan Kutapanjang.

dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut digunakan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.²² Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan program pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh.

Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.
2. Pegawai atau staf pada bidang yang menangani program rumah dhuafa.
3. Aparatur gampong yang terlibat dalam proses pendataan masyarakat penerima bantuan.
4. Masyarakat penerima bantuan rumah dhuafa.
5. Pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan rumah dhuafa.

Melalui data primer tersebut, peneliti memperoleh informasi mengenai proses perencanaan program, pelaksanaan pembangunan rumah dhuafa, koordinasi antar pihak terkait, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai dokumen, arsip, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.²³ Data sekunder digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer sehingga analisis penelitian menjadi lebih kuat dan sistematis.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 157.²²

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 137.

2. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.
3. Dokumen program pembangunan rumah dhuafa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.
4. Buku-buku yang berkaitan dengan teori peran, pelayanan publik, koordinasi, dan administrasi publik.
5. Jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian.
6. Data laporan kegiatan dan dokumentasi pembangunan rumah dhuafa.

Data sekunder tersebut digunakan sebagai landasan teoritis sekaligus bahan pendukung untuk menganalisis pelaksanaan program pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh.

3.5 Informan Penelitian

Pelaksanaan penelitian membutuhkan informan sebagai pihak yang memberikan informasi mengenai objek yang diteliti. Dalam pendekatan kualitatif, informan adalah individu yang memiliki pengetahuan serta pemahaman terhadap fokus penelitian. Oleh karena itu, penentuan informan harus didasarkan pada kriteria yang jelas sehingga informasi yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi penelitian.

Tabel 3.2

Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Di Kota Banda Aceh	1 orang
2.	Kepala Bidang Perumahan Rakyat Kota Banda Aceh	1 orang
3.	Kepala Seksi Perumahan Rakyat Kota Banda Aceh	1 orang
Jumlah		3 orang

Sumber : Data Yang Diolah 2026

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian mengenai Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam Pembangunan Rumah Dhuafa di Kota Banda Aceh, teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penggunaan beberapa teknik tersebut bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan program pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh. Peneliti mengamati kondisi rumah penerima bantuan, proses pembangunan rumah, serta aktivitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam pelaksanaan program.

Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan, termasuk kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan rumah dhuafa.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan.²⁵ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan program pembangunan rumah dhuafa.

Adapun informan penelitian meliputi:

1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.
2. Pegawai atau staf yang menangani program rumah dhuafa.
3. Aparatur gampong.
4. Masyarakat penerima bantuan rumah dhuafa.
5. Pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai peran dinas dalam perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, serta hambatan dalam pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 106.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 186.

c. Dokumen

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengkajian dokumen, arsip, laporan, foto, dan berbagai data tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung mengenai program pembangunan rumah dhuafa, seperti:

1. Data penerima bantuan rumah dhuafa.
2. Dokumen program dan laporan kegiatan.
3. Foto pembangunan rumah dhuafa.
4. Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.
5. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perumahan dan kawasan permukiman.

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara sehingga data penelitian menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti diharapkan mampu memperoleh data yang komprehensif mengenai peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilaksanakan benar-benar memenuhi kaidah ilmiah serta data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan melalui *member check*, yaitu proses verifikasi data kepada informan. Tujuan dari *member check* adalah untuk menilai sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh informan. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penyusunan laporan benar-benar mencerminkan maksud dan pernyataan informan.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 274.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjadi bagian penting dalam penelitian ini karena memberikan pemahaman awal mengenai kondisi wilayah yang menjadi objek kajian. Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh merupakan pusat aktivitas pemerintahan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Sebagai wilayah perkotaan, Banda Aceh memiliki dinamika pembangunan yang cukup pesat, namun disisi lain masih menghadapi berbagai permasalahan sosial, termasuk keberadaan masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni.

Permasalahan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau dhuafa menjadi isu yang cukup kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik bangunan, tetapi juga menyangkut kesejahteraan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Aceh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh memiliki tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan tersebut melalui berbagai program pembangunan perumahan.²⁷

Salah satu program yang menjadi fokus adalah pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) yang diperuntukkan bagi masyarakat dhuafa. Program ini merupakan implementasi dari kebijakan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 145 Tahun 2016 tentang Pembangunan Rumah Layak Huni.²⁸ Dalam kebijakan tersebut ditegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyediakan hunian yang layak sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kota Banda Aceh menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam melaksanakan program pembangunan rumah dhuafa. Kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat di Kota Banda Aceh menjadi latar belakang penting dalam menganalisis peran pemerintah daerah dalam pembangunan rumah layak huni.

²⁷ Dinas Perkim Aceh, Tugas dan Fungsi, 2026

²⁸ Pergub Aceh No.145 Tahun 2016.

4.2 Hasil dan Pembahasan

4.2.1 Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam Pembangunan Rumah Dhuafa di Kota Banda Aceh

Secara umum hasil wawancara menunjukkan bahwa dinas memiliki peran yang cukup luas dan tidak hanya terbatas pada pelaksanaan pembangunan fisik, tetapi juga mencakup berbagai tahapan dalam proses kebijakan. Peran tersebut meliputi perencanaan program, penentuan penerima bantuan, pelaksanaan pembangunan, hingga pengawasan terhadap hasil pembangunan. Dengan demikian, dinas berperan sebagai aktor utama dalam memastikan bahwa program pembangunan rumah dhuafa dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Aceh. Salah satu pernyataan utama yang disampaikan oleh narasumber adalah sebagai berikut:

Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam pembangunan rumah dhuafa pada dasarnya adalah sebagai pelaksana teknis dari kebijakan pemerintah Aceh dalam menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu (Wawancara, 28 Maret 2026).

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh memiliki posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang perumahan. Peran sebagai pelaksana teknis menunjukkan bahwa dinas tidak hanya bertugas menjalankan perintah administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan secara nyata di lapangan. Dalam hal ini, dinas harus mampu menerjemahkan kebijakan yang bersifat umum ke dalam bentuk program yang lebih konkret dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Hal ini menjadi penting karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pelaksanaan program harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Selain itu peran ini juga menuntut dinas untuk memiliki kemampuan manajerial yang baik agar program dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dinas harus mampu mengatur sumber daya yang tersedia, baik dari segi anggaran, tenaga kerja, maupun waktu pelaksanaan, sehingga program pembangunan rumah dhuafa dapat memberikan hasil yang optimal. Dengan demikian, peran sebagai pelaksana teknis tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam menentukan keberhasilan program.

Selain menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan, dinas juga melaksanakan program Rumah Layak Huni sebagai bentuk nyata dari kebijakan tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh narasumber:

Program yang dijalankan adalah pembangunan Rumah Layak Huni yang bertujuan membantu masyarakat miskin agar memiliki tempat tinggal yang layak (Wawancara, 28 Maret 2026).

Program Rumah Layak Huni merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam mengatasi permasalahan perumahan yang dihadapi oleh masyarakat dhuafa. Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Rumah yang layak huni memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi tempat berlindung sekaligus ruang untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Dengan adanya rumah yang layak, masyarakat dapat hidup dengan lebih aman, nyaman, dan sehat. Selain itu, kondisi rumah yang baik juga dapat berdampak positif terhadap aspek sosial dan psikologis masyarakat, seperti meningkatkan rasa percaya diri dan stabilitas keluarga. Program ini juga menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang kurang mampu, sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial yang ada. Namun demikian, pelaksanaan program ini tentu memerlukan perencanaan yang matang serta koordinasi yang baik antara berbagai pihak agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Oleh karena itu, dinas memiliki peran penting dalam memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat penerima bantuan. Dalam pelaksanaan program tersebut, dinas juga melakukan proses pendataan dan verifikasi terhadap calon penerima bantuan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh narasumber:

Penentuan penerima dilakukan melalui pendataan oleh gampong dan diverifikasi langsung oleh dinas melalui survei lapangan (Wawancara, 28 Maret 2026).

Proses pendataan dan verifikasi merupakan tahapan yang sangat krusial dalam pelaksanaan program pembangunan rumah dhuafa. Pendataan dilakukan untuk mengidentifikasi masyarakat

yang benar-benar membutuhkan bantuan, sementara verifikasi bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kondisi di lapangan. Keterlibatan pemerintah gampong dalam proses pendataan menunjukkan adanya pendekatan yang berbasis pada kondisi lokal, karena pemerintah gampong dianggap lebih mengetahui keadaan masyarakat di wilayahnya.

Hal ini dapat meningkatkan akurasi data yang diperoleh, sehingga bantuan dapat diberikan kepada pihak yang tepat. Setelah pendataan dilakukan, dinas kemudian melakukan verifikasi melalui survei lapangan. Proses ini penting untuk menghindari kesalahan dalam penentuan penerima bantuan, seperti adanya data yang tidak valid atau tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, verifikasi juga berfungsi untuk memastikan bahwa kondisi rumah yang dimiliki oleh calon penerima tidak layak huni dan memerlukan bantuan.

Dengan adanya proses pendataan dan verifikasi yang baik, diharapkan program pembangunan rumah dhuafa dapat berjalan secara transparan dan akuntabel, serta mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Selain pendataan dan verifikasi, dinas juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan rumah dhuafa. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh narasumber:

Selama proses pembangunan berlangsung, dinas melakukan pengawasan agar rumah yang dibangun memenuhi standar layak huni (Wawancara, 28 Maret 2026).

Pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program pembangunan, karena berfungsi untuk memastikan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks pembangunan rumah dhuafa, pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa rumah yang dibangun memenuhi kriteria kelayakan hunian, baik dari segi keamanan, kenyamanan, maupun kesehatan. Tanpa adanya pengawasan yang baik, terdapat risiko bahwa pembangunan tidak dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, sehingga kualitas rumah yang dihasilkan tidak optimal. Selain itu, pengawasan juga berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran atau pelaksanaan pekerjaan.

Dengan adanya pengawasan yang ketat, dinas dapat memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Hal ini juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program yang dijalankan oleh pemerintah. Oleh karena itu, peran pengawasan yang dilakukan oleh dinas menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan program pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh.

4.2.2 Kendala Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam Pembangunan Rumah Dhuafa di Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan program pembangunan rumah dhuafa yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh. Kendala-kendala tersebut tidak hanya bersifat teknis di lapangan, tetapi juga berkaitan dengan aspek struktural yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program secara keseluruhan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program telah dirancang dengan baik dan memiliki tujuan yang jelas, dalam praktiknya tetap terdapat berbagai hambatan yang harus dihadapi oleh pelaksana kebijakan. Kendala ini menjadi penting untuk dikaji karena dapat mempengaruhi keberhasilan program dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, dengan memahami kendala yang ada, dapat diketahui langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan program di masa yang akan datang agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Kendala utama adalah keterbatasan anggaran (Wawancara, 28 Maret 2026).

Keterbatasan anggaran merupakan salah satu hambatan paling mendasar dalam pelaksanaan pembangunan rumah dhuafa. Dalam konteks ini, jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan rumah layak huni masih cukup besar, sementara kemampuan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah terbatas. Kondisi ini menyebabkan tidak semua masyarakat yang memenuhi kriteria dapat langsung menerima bantuan, sehingga dinas harus melakukan prioritas dalam penyaluran bantuan. Penentuan prioritas ini biasanya didasarkan pada tingkat urgensi kebutuhan, seperti kondisi rumah yang sangat tidak layak atau kondisi ekonomi yang

sangat rendah. Namun demikian, keterbatasan anggaran juga dapat berdampak pada aspek lain, seperti jumlah unit rumah yang dapat dibangun dalam satu tahun anggaran serta kualitas bahan bangunan yang digunakan.

Oleh karena itu dinas dituntut untuk mampu mengelola anggaran secara efektif dan efisien agar program tetap dapat berjalan dengan baik meskipun dalam kondisi keterbatasan. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menunjukkan perlunya dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun pihak lain, untuk membantu memperluas cakupan program pembangunan rumah dhuafa.

Masalah administrasi kepemilikan tanah juga menjadi hambatan (Wawancara, 28 Maret 2026).

Permasalahan administrasi kepemilikan tanah merupakan kendala lain yang cukup signifikan dalam pelaksanaan pembangunan rumah dhuafa. Dalam praktiknya, tidak semua calon penerima bantuan memiliki dokumen kepemilikan tanah yang lengkap dan sah secara hukum. Hal ini menjadi hambatan karena pembangunan rumah tidak dapat dilakukan jika status tanah tidak jelas, mengingat hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, seperti sengketa lahan atau klaim dari pihak lain.

Dinas harus memastikan bahwa setiap penerima bantuan memiliki bukti kepemilikan tanah yang valid sebelum pembangunan dilakukan. Proses ini seringkali memerlukan waktu yang cukup lama karena melibatkan proses administrasi yang tidak sederhana, seperti pengurusan sertifikat tanah atau dokumen pendukung lainnya. Selain itu, kondisi ini juga menunjukkan bahwa permasalahan perumahan tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik bangunan, tetapi juga berkaitan dengan aspek legalitas yang harus dipenuhi. Dengan demikian, penyelesaian masalah administrasi tanah menjadi salah satu langkah penting yang harus dilakukan agar program pembangunan rumah dhuafa dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang.

Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan program adalah proses pendataan masyarakat yang membutuhkan bantuan, yang memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Pendataan merupakan tahap awal yang sangat menentukan dalam keberhasilan

program, karena data yang tidak akurat dapat menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Dalam praktiknya, pendataan dilakukan dengan melibatkan pemerintah gampong, yang memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi masyarakat di wilayahnya.

Namun demikian data yang diperoleh tetap perlu diverifikasi oleh dinas melalui survei lapangan untuk memastikan kebenarannya. Proses ini seringkali memerlukan waktu yang cukup lama karena harus dilakukan secara cermat dan menyeluruh. Selain itu, terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan data antara yang dilaporkan oleh pemerintah gampong dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga memerlukan proses klarifikasi lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa pendataan bukanlah proses yang sederhana, melainkan membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai pihak serta sistem yang mampu menjamin keakuratan data. Dengan demikian, peningkatan kualitas pendataan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa program pembangunan rumah dhuafa dapat berjalan secara adil dan tepat sasaran.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan rumah dhuafa bersifat struktural dan teknis. Kendala struktural terlihat dari keterbatasan anggaran yang mempengaruhi cakupan program, sementara kendala teknis terlihat dari permasalahan administrasi kepemilikan tanah serta proses pendataan yang kompleks. Meskipun demikian, keberadaan kendala tersebut bukan berarti program tidak dapat berjalan, melainkan menjadi tantangan yang harus diatasi melalui perbaikan sistem, peningkatan koordinasi, serta pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Dengan demikian, diharapkan program pembangunan rumah dhuafa dapat terus dilaksanakan secara lebih efektif dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam Pembangunan Rumah Dhuafa di Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, diketahui bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan rumah dhuafa di

Kota Banda Aceh. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada pelaksanaan pembangunan fisik rumah, tetapi juga mencakup proses perencanaan program, pendataan calon penerima bantuan, verifikasi lapangan, pengawasan pembangunan, serta koordinasi dengan pemerintah gampong dan pihak terkait lainnya.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa dinas menjalankan program Rumah Layak Huni (RLH) sebagai bentuk implementasi kebijakan pemerintah Aceh dalam membantu masyarakat kurang mampu memperoleh tempat tinggal yang layak. Dalam pelaksanaannya, dinas melakukan pendataan masyarakat penerima bantuan bersama aparaturnya gampong untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Berdasarkan analisis peneliti, peran yang dijalankan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh telah menunjukkan adanya pelaksanaan fungsi organisasi pemerintah dalam bidang pelayanan sosial masyarakat. Dinas tidak hanya bertindak sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga berperan aktif dalam memastikan bahwa program bantuan rumah dhuafa berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan pemerintah daerah.

Hal tersebut sesuai dengan teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status yang dimiliki seseorang maupun lembaga dalam menjalankan hak dan kewajibannya.²⁹ Dalam konteks penelitian ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh telah menjalankan perannya sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Pelaksanaan peran tersebut terlihat dari keterlibatan dinas dalam seluruh tahapan program pembangunan rumah dhuafa.

Menurut analisis peneliti, keberhasilan pelaksanaan program pembangunan rumah dhuafa juga dipengaruhi oleh adanya koordinasi antara dinas dengan pemerintah gampong. Pemerintah gampong memiliki peran penting dalam memberikan informasi terkait kondisi masyarakat di wilayahnya, sehingga proses pendataan penerima bantuan dapat dilakukan secara lebih tepat

²⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 212.

sasaran. Koordinasi tersebut menunjukkan adanya kerja sama antar lembaga dalam mendukung keberhasilan program pemerintah.

Jika dikaitkan dengan teori koordinasi yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian, koordinasi merupakan proses penyelarasan kegiatan antar bagian organisasi agar tujuan dapat tercapai secara efektif.³⁰ Dalam penelitian ini, koordinasi antara dinas dan pemerintah gampong menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan rumah dhuafa.

Selain itu, pelaksanaan program rumah dhuafa juga menunjukkan adanya bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. Program tersebut tidak hanya bertujuan menyediakan rumah layak huni, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Rumah yang layak huni memberikan dampak positif terhadap kesehatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat penerima bantuan.

Menurut analisis peneliti, program pembangunan rumah dhuafa memiliki dampak sosial yang cukup besar karena mampu membantu masyarakat dhuafa memperoleh tempat tinggal yang lebih layak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program pemerintah di bidang perumahan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik semata, tetapi juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.³¹

Berdasarkan interpretasi akademik, peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam pembangunan rumah dhuafa dapat dikategorikan telah berjalan cukup baik sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah di bidang perumahan. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan melalui penguatan koordinasi, peningkatan kualitas pendataan, serta optimalisasi pengelolaan program agar manfaat pembangunan rumah dhuafa dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

³⁰ Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 95.

³¹ Agus Sadana, *Perencanaan Kawasan Permukiman* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 67.

4.3.2 Kendala Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam Pembangunan Rumah Dhuafa di Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh masih menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas program. Kendala tersebut meliputi keterbatasan anggaran, permasalahan administrasi kepemilikan tanah, serta proses pendataan masyarakat penerima bantuan yang membutuhkan ketelitian tinggi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program pembangunan rumah dhuafa. Jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan rumah layak huni masih cukup banyak, sedangkan kemampuan anggaran pemerintah daerah masih terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan tidak semua masyarakat yang memenuhi kriteria dapat menerima bantuan secara bersamaan.

Menurut analisis peneliti, keterbatasan anggaran berdampak langsung terhadap cakupan pelaksanaan program pembangunan rumah dhuafa. Dinas harus melakukan prioritas terhadap masyarakat yang dianggap paling membutuhkan bantuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program pemerintah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, khususnya sumber daya keuangan.

Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan, salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumber daya.³² Keterbatasan sumber daya dapat menghambat pelaksanaan program pemerintah, meskipun kebijakan yang dibuat telah dirancang dengan baik. Dalam penelitian ini, keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas pembangunan rumah dhuafa.

Selain keterbatasan anggaran, kendala lain yang ditemukan adalah masalah administrasi kepemilikan tanah masyarakat penerima bantuan. Tidak semua calon penerima bantuan memiliki dokumen kepemilikan tanah yang lengkap dan sah secara hukum. Hal tersebut menyebabkan proses pembangunan rumah tidak dapat

³² George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 10.

langsung dilaksanakan karena pemerintah harus memastikan legalitas tanah sebelum pembangunan dilakukan.

Berdasarkan analisis peneliti, permasalahan administrasi tanah menunjukkan bahwa pembangunan rumah dhuafa tidak hanya berkaitan dengan aspek pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut aspek legalitas dan administrasi pemerintahan. Ketidaklengkapan dokumen kepemilikan tanah dapat menimbulkan risiko hukum di kemudian hari apabila pembangunan tetap dilaksanakan tanpa kepastian status lahan.

Kendala lainnya adalah proses pendataan masyarakat penerima bantuan yang membutuhkan ketelitian tinggi. Dalam pelaksanaan program, data penerima bantuan harus benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat agar bantuan dapat tepat sasaran. Oleh karena itu, dinas harus melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh dari pemerintah gampong.

Menurut interpretasi akademik peneliti, proses pendataan yang kompleks menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan sosial membutuhkan sistem administrasi dan koordinasi yang baik antar lembaga. Kesalahan dalam pendataan dapat menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran dan menimbulkan ketidakadilan di masyarakat.

Secara keseluruhan, kendala yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam pembangunan rumah dhuafa bersifat struktural dan teknis. Kendala struktural berkaitan dengan keterbatasan anggaran, sedangkan kendala teknis berkaitan dengan administrasi tanah dan pendataan masyarakat penerima bantuan. Meskipun demikian, upaya yang dilakukan dinas melalui koordinasi dengan pemerintah gampong dan pengawasan lapangan menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh telah berjalan secara cukup baik dan sesuai dengan tugas serta fungsinya sebagai pelaksana kebijakan di bidang perumahan. Dinas terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan, pendataan dan verifikasi penerima bantuan, pelaksanaan pembangunan, hingga pengawasan. Selain itu, adanya keterlibatan pemerintah gampong dalam proses pendataan menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah menerapkan pendekatan partisipatif, sehingga bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran. Program Rumah Layak Huni yang dilaksanakan juga terbukti memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal serta kesejahteraan keluarga penerima bantuan.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas program pembangunan rumah dhuafa. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak semua masyarakat yang membutuhkan dapat menerima bantuan. Selain itu, permasalahan administrasi kepemilikan tanah juga menjadi hambatan karena tidak semua calon penerima memiliki dokumen yang lengkap. Kendala lain yang turut mempengaruhi adalah proses pendataan yang memerlukan ketelitian tinggi agar bantuan dapat tepat sasaran. Dengan demikian, meskipun program telah berjalan dengan baik, masih diperlukan upaya perbaikan dalam pengelolaan anggaran, administrasi, serta sistem pendataan agar pelaksanaan program ke depan dapat lebih optimal dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh agar dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan rumah dhuafa, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan penentuan prioritas penerima bantuan. Dinas juga perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah gampong serta

instansi terkait agar proses pendataan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran. Selain itu, diperlukan upaya pendampingan kepada masyarakat dalam melengkapi administrasi kepemilikan tanah, sehingga kendala legalitas lahan tidak lagi menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan.

Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih optimal, baik dalam bentuk penambahan anggaran maupun penyederhanaan prosedur administrasi, agar program pembangunan rumah dhuafa dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam terkait efektivitas program dan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pengembangan kebijakan di bidang perumahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Arief, M., R. Putra, dan E. Ermanovida. 2018. *Peran Dinas Pendidikan dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah di Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir*. Palembang: Sriwijaya University.
- Balaka, S., L. Geo, dan M. Natsir. 2018. *Dinamika Penggunaan Lahan di Kecamatan Puuwatu dan Kecamatan Baruga Kota Kendari*. Kendari: Jurnal Perencanaan Wilayah.
- Biddle, Bruce J. 1986. *Recent Developments in Role Theory*. California: Annual Review of Sociology.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dhohiri, Taufiq Rohman. 2006. *Pengenalan Sosiologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dwiyanto, Agus. 2018. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. 2024. *Teori Administrasi Publik dan Penerapannya di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2017. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pasolong, Harbani. 2019. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: Rajawali Pers.
- Horton, Paul B., dan Chester L. Hunt. 1987. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Komaruddin. 2001. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Linton, Ralph. 1936. *The Study of Man*. New York: Appleton-Century.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2012. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: Refika Aditama.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Matondang, E. M. 2021. *Peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gayo Lues dalam Penyelenggaraan Lingkungan Sehat Perumahan bagi Masyarakat Kecamatan Kutapanjang*. Banda Aceh: Tidak diterbitkan.
- Mead, George Herbert. 1934. *Mind, Self, and Society*. Chicago: University of Chicago Press.
- Merton, Robert K. 1968. *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. 2018. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Parsons, Talcott. 1951. *The Social System*. New York: Free Press.
- Pratama, R. P. 2020. *Kebutuhan Sarana dan Prasarana Umum di Perumahan Joyogrand Kota Malang Berdasarkan Persepsi Masyarakat*. Malang: Institut Teknologi Nasional Malang.
- Purwanugraha, A., dan H. Kertayasa. 2022. *Peran Komunikasi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMK Farmasi Purwakarta*. Purwakarta: Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.
- Robbins, Stephen P. 2006. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saraswati, E. 2010. *Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan (SNI 03-1733-2004)*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Siagian, Sondang P. 2005. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syamsir Torang. 2014. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.

- Terry, George R. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijaya, H. 2018. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.



lampiran 1 Surat keputusan dekan fisip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor: 358/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2025

TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2024, Tanggal 24 November 2023.
- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **08 Maret 2023**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara:
Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si.
Untuk membimbing skripsi:
Nama : **Asra Bi Abdih**
NIM : 190802128
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Peran Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Aceh dalam melakukan Pembangunan Rumah Dhuafa di Kota Banda Aceh
- KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

lampiran 2 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-128/Un.08/FISIP.I.05/01/2026
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 190802128
Nama : Asra bi abdihi
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Jl. Jakalam no 14

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ACEH DALAM PEMBANGUNAN RUMAH DHUFA DI KOTA BANDA ACEH**

Banda Aceh, 29 Januari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

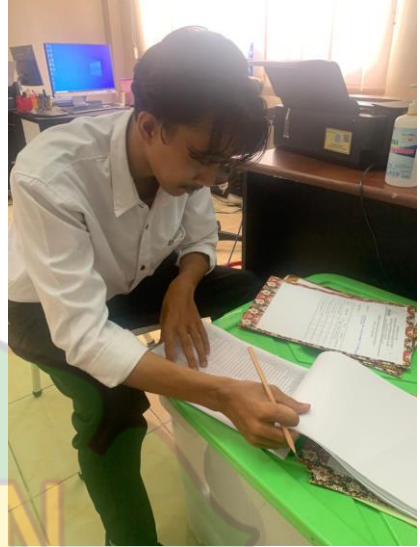
lampiran 3 Pedoman wawancara

Judul Skripsi : Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh

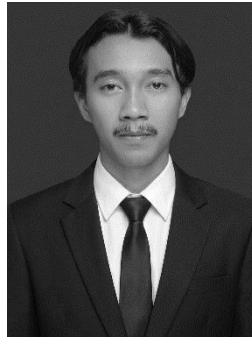
Pertanyaan :

1. Bagaimana Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam pelaksanaan pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh?
2. Program atau kebijakan apa saja yang dijalankan dinas untuk mendukung pembangunan rumah bagi masyarakat dhuafa?
3. Apa dasar hukum atau regulasi yang menjadi acuan dalam pembangunan rumah dhuafa tersebut?
4. Bagaimana mekanisme penentuan dan pendataan penerima bantuan rumah dhuafa?
5. Bagaimana proses pelaksanaan pembangunan rumah dhuafa, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian?
6. Pihak-pihak apa saja yang terlibat dan bagaimana bentuk koordinasi dalam pelaksanaan program ini?
7. Kendala apa yang paling sering dihadapi dinas dalam pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh?
8. Upaya apa yang dilakukan dinas untuk mengatasi kendala tersebut?
9. Bagaimana dampak pembangunan rumah dhuafa terhadap kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat penerima?
10. Apa harapan dan rencana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh ke depan terkait pembangunan rumah dhuafa?

lampiran 4 Dokumentasi Penelitian



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Asra Bi Abdihi
Tempat & Tanggal Lahir : Aceh Tengah, 29 September 2001
No. Hp : 085362924137
Alamat : JL. JAKALAM NO. 14
Email : 190802128@student.ar-raniry.ac.id

Pendidikan

Sekolah Dasar : MIN Seutui Banda Aceh
Sekolah Menengah Pertama : MTS Babun Najah Banda Aceh
Sekolah Menengah Atas : MAS Babun Najah Banda Aceh

Sertifikasi

Ma'had Jamiah : 77 | 2021 | Asrama Rusunawa
TOEFL : 403 | 2024 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Komputer : 79 | 2026 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Magang : 95 | 2022 | Dinas Pertanahan Aceh